



TUNGGU PROSES PEMBAHASAN RAPERDA
Pengelolaan Parkir Diwacanakan Satu Instansi

YOGYA (KR) - Pengelolaan parkir di Kota Yogya hingga saat ini dinilai kurang efektif. Hal ini lantaran setidaknya ada tiga bidang yang mengurus parkir. Pemkot pun mewacanakan supaya cukup dijadikan satu instansi agar memudahkan pengawasan maupun pelayanan.

Tiga instansi yang mengurus parkir tersebut ialah Dinas Perhubungan, UPT Malioboro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Selain itu, masing-masing kecamatan juga memiliki kewenangan untuk mengatur parkir yang bersifat insidental. "Besok harapannya hanya satu saja yang mengurus parkir. Itu di bawah Pemkot Yogya. Jadi tidak lagi di Dinas Perhubungan, UPT Malioboro maupun Disperindag," jelas Walikota Yogya Haryadi Suyuti, Kamis (6/7).

Selama ini, Dinas Perhubungan membawahi seluruh parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Sedangkan UPT Malioboro menangani seluruh parkir di kawasan Malioboro. Kemudian Disperindag bertanggung jawab atas parkir di setiap pasar tradisional.

Terkait wacana penyatuan urusan parkir dalam satu instansi itu, Haryadi mengaku masih akan membahas untuk menentukan instansi yang ditunjuk. Kendati begitu, pihaknya juga menunggu proses pembahasan raperda terkait parkir yang tengah dibahas kalangan dewan. "Keputusan nanti di perda yang dibahas. Apapun hasilnya, semua akan disesuaikan," tandasnya.

Sebelumnya, panitia khusus (pansus) Raperda Perparkiran DPRD Kota Yogya juga sempat mewacanakan hal serupa.

Terutama setelah para anggota pansus melakukan studi banding pengelolaan parkir di Batam.

Menurut Wakil Ketua Pansus Raperda Perparkiran, HM Fursan, wacana tersebut untuk mempermudah pengawasan dan meminimalisir potensi kebocoran pendapatan dari sektor parkir. Hal itu juga melihat persoalan parkir di Kota Yogya yang selalu tumpang tindih. Tapi ini masih terus dibahas. Kami juga melibatkan berbagai pihak agar keputusan akhir yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan Kota Yogya. Semoga tidak ada lagi saling lempar jika ada persoalan parkir, paparnya.

Bahkan, selain pengelolaan parkir, di internal pansus juga sempat muncul usulan agar juru parkir dibayar melalui APBD.

(Dhi)-d

Sifat	Tipe
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Umum
<input type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Urgen
<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jurus

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. UPT. Malioboro 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005